



**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Juni 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 dan masalah aktual lainnya.
Ketua Rapat	: Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Susi Daryati, SH, MH/ Plt. Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 dari 46 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua DKPP RI. C. Sekjen KPU RI. D. Sekjen Bawaslu RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI agenda pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 dan masalah aktual lainnya, pada hari Rabu, 19 Juni 2019, dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan terkait Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar **Rp1.992.861.595.000,-** (*satu trilyun sembilan ratus sembilan puluh dua*

milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menerima penjelasan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh KPU sebesar **Rp1.201.388.105.000,-** (*satu trilyun dua ratus satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima ribu rupiah*), dan usulan realokasi anggaran KPU Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp310.000.000.000,-** (*tiga ratus sepuluh milyar rupiah*), dan akan membahas lebih lanjut pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.
3. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan terkait Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar **Rp2.844.862.603.000,-** (*dua trilyun delapan ratus empat puluh empat milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah*), termasuk di dalamnya anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar **Rp10.720.000.000,-** (*sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*). Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.
4. Komisi II DPR RI menerima penjelasan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Bawaslu sebesar **Rp497.099.425.000,-** (*empat ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan akan membahas lebih lanjut pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.
5. Komisi II DPR RI menerima penjelasan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh DKPP sebesar **Rp147.169.784.000,-** (*seratus empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), dan akan membahas lebih lanjut pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya.
6. Komisi II DPR RI akan membahas lebih lanjut tentang satker anggaran DKPP pada rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

Jakarta, 19 Juni 2019
KETUA RAPAT

TTD

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI
A-419

